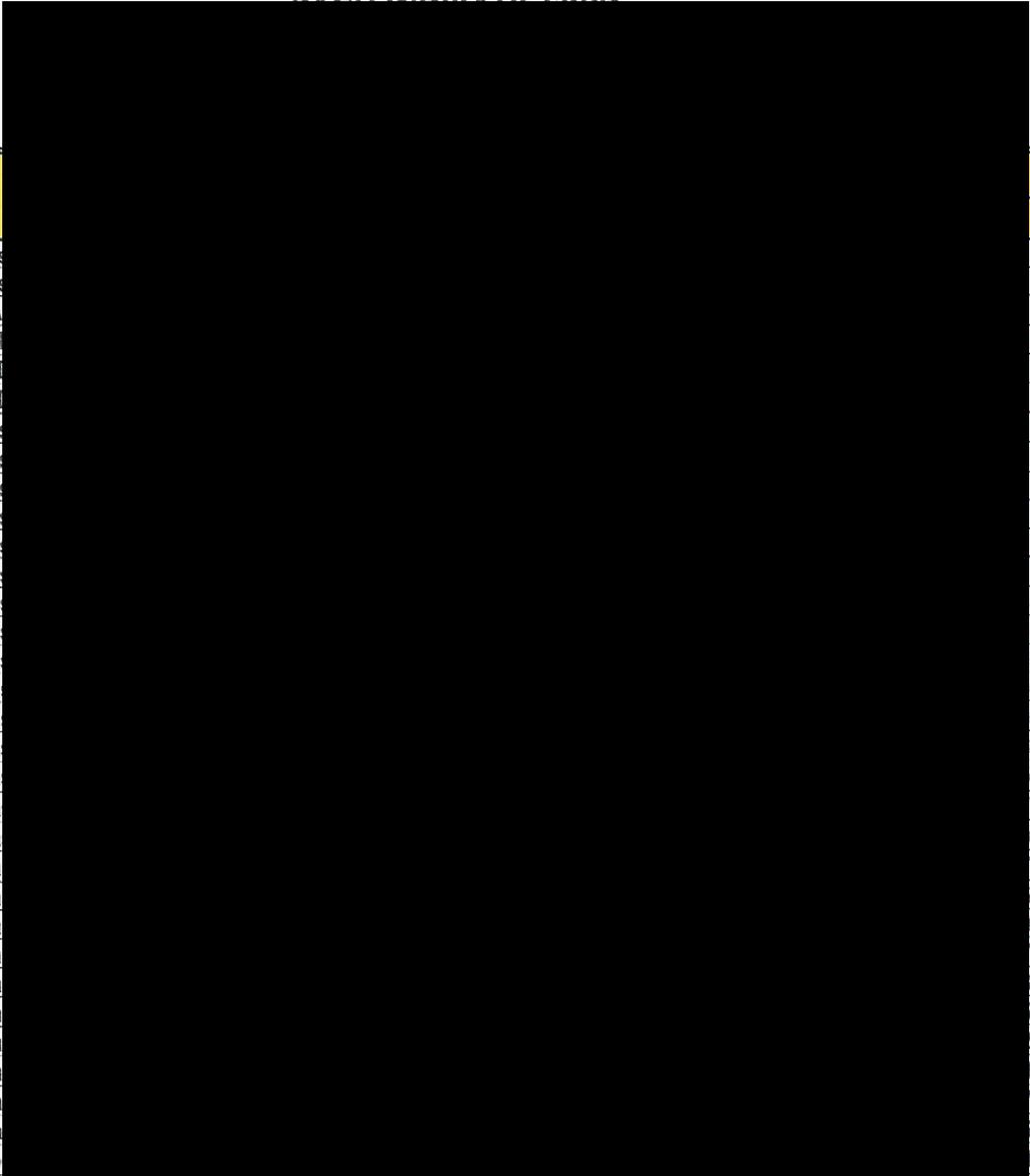


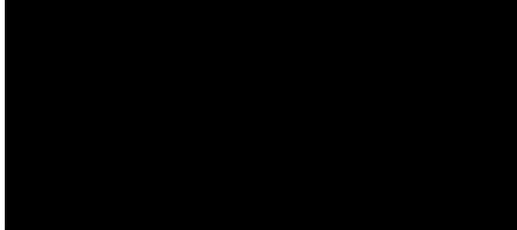
DAFTAR INDIKATIF SKOP



No			
1	Dinas		
2	Dinas		
3	RS A		
4	RSJ		
5	RSU		
6	RSU		
7	Dinas		
8	Dinas		
9	Dinas		
10	Dinas		
11	Dinas		
12	Dinas		
13	Dinas		
14	Dinas		
15	Dinas		
16	Dinas		
17	Dinas		
18	Dinas		
19	Dinas		
20	Dinas		
21	Dinas		
22	Dinas		
23	Dinas		
24	Dinas		
25	Dinas		
26	Dinas		
27	Dinas		
28	Dinas		
29	Dinas		
30	Dinas		
31	Dinas		
32	Insp		
33	Bappeda	13,928,902,882	10,428,902,882
34	Badan Keuangan Daerah	18,947,188,614	33,947,188,614
35	Badan Kepegawaian Daerah	6,511,110,739	10,511,110,739
36	Badan Pengembangan SDM	9,401,988,564	9,901,988,564
37	Badan Penelitian & Pengembangan	3,030,785,902	3,530,785,902
38	Badan Penghubung	4,227,385,741	6,727,385,741
39	Biro Pemerintahan	5,711,793,618	5,711,793,618
40	Biro	8,957,887,500	8,957,887,500
41	Biro		60
42	Biro		89
43	Biro		47
44	Biro		06
45	Biro		50
46	Biro		89
47	Biro		00
48	Sek		70
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,688,161,738	5,388,161,738
50	BPBD	9,949,429,567	9,949,429,567
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,117,848,698,510</b>	<b>2,187,803,717,510</b>



**Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019  
Provinsi Sumatera Barat**



10-390-103

**OPD : BIRO HUKUM**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			2.286.089.960
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			2.286.089.960
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>256.478.960</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	2.100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	3.000.000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	2 unit Mobil	10.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	16.432.100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum	12 bulan	24.553.925
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	18.000.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat	12 bulan	180.292.935
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	2.100.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100	57.050.000
		Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	
1	Pengadaan Meubeuler	Tersedianya sarana penyimpanan dokumen SKPD	2 unit lemari arsip	10.000.000
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya sarana/peralatan kerja aparatur	3 unit (1 unit PC, <del>1 unit laptop</del> , 2 unit printer)	15.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dan motor dinas/operasional	4 unit (2 unit mobil, 2 unit motor)	20.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	5 unit AC	1.750.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	6 unit (2 unit PC, 2 unit laptop, 2 unit printer)	3.300.000
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	1 unit AC	7.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	15 jpl/org/ tahun	82.840.000
		1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	10 jpl/org/thn

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	209.404.000	
		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	A		
		Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100%		
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	100%		
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%		
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	8.070.500	
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	124.389.000	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	12 bulan	8.280.000	
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	12 bulan	68.664.500	
V	Program Pembangunan Materi Hukum	Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	6	739.321.000	
		1 Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	6 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	468.308.000
		2 Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional dan terlaksananya Rakor	6 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	103.963.000
		3 Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	Daftar Propem Perda	86.762.000
		4 <i>Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah</i>	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	6 Perda, dan 85 Pergub	80.288.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum</b>	<b>Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani</b>	4	279.807.000
	1 Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Terselurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Bantuan advokasi sebanyak 4 perkara	60.970.000
	2 <i>Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota</i>	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	5 Kasus	47.360.000
	3 Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus di Pengadilan	Penyelesaian 3 perkara	104.477.000
	4 <i>Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia</i>	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi laporan/data HAM dan produk hukum berspektif HAM	Laporan RANHAM	67.000.000
<b>VII</b>	<b>Program Sarana dan Informasi Hukum</b>	<b>Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH</b>	100	133.294.000
	1 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	19 Kab/Kota	44.204.000
	2 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terkelolanya SJDIH dan kemudahan pengaksesan informasi dan produk hukum daerah	225 Buku	89.090.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
VIII	<b>Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota</b>	115	527.895.000
	1 Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	20 Ranperda Kab./Kota	127.000.000
	2 Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan peraturan daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	20 Perda Kab./Kota	135.000.000
	3 Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	15 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	104.000.000
	4 Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Terlaksananya fasilitasi rancangan peraturan daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	161.895.000

BIRO HUKUM

PROV. SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

APBD 2018 (BELANJA LANGSUNG)= Rp. 2.682.660.810,-

No	Program	Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)		PEMBAHASAN TIM		Rancangan ke-2	Rancangan ke-3	KETERANGAN OPD	KEPUTUSAN TAPD
		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	RP.	KETERANGAN				
	Total Keseluruhan					3.667.000.000	3.667.000.000	2.566.900.000		1.786.089.960	2.286.089.960		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase pelayanan administrasi perkantoran		341.313.000	341.313.000	251.732.850		209.726.960	256.478.960		
30		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	21.313.000	21.313.000	16.613.300		16.432.100	16.432.100		
402		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	surat kabarsinggalang, Padang Ekspres, Surat Kabar Nasional, Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan	25.000.000	25.000.000	18.000.000		12.000.000	18.000.000		
31		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bulan	30.000.000	30.000.000	28.108.450		24.553.925	24.553.925		
29		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	2 unit,mobil	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000		
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 bulan	3.000.000	3.000.000	2.500.000		2.500.000	3.000.000		
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat	12 bulan	7.000.000	7.000.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000		
405		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	12 bulan	5.000.000	5.000.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000		
403		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	12 bulan	240.000.000	240.000.000	172.311.100		140.040.935	180.292.935		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		108.000.000	108.000.000	35.050.000		28.700.000	57.050.000		
429		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan operasional/dinas yang terpelihara	4 unit/ 12 bln	25.000.000	25.000.000	20.000.000		15.000.000	20.000.000		
475		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	komputer 2, laptop 2, printer 2/ 1 thn	5.000.000	5.000.000	3.300.000		2.650.000	3.300.000		
460		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	AC /5 unit	3.000.000	3.000.000	1.750.000		1.050.000	1.750.000		
418		Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	2 unit/ 1 komputer, 1 printer	40.000.000	40.000.000	10.000.000		10.000.000	15.000.000		
406		Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	4 unit/lemari arsip	20.000.000	20.000.000	-	ditangguhkan	-	10.000.000		
2745		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor pada Biro Hukum	3 Unit AC	15.000.000	15.000.000	-	ditangguhkan	-	7.000.000		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		150.000.000	150.000.000	80.312.000		67.032.000	82.840.000		
483		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya PNS yang mengikuti Bimtek	10 JPL/Org/Tahun	150.000.000	150.000.000	80.312.000		67.032.000	82.840.000		

No	Program	Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)		PEMBAHASAN TIM		Rancangan ke-2	Rancangan ke-3	KETERA NGAN OPD	KEPUTU SAN TAPD									
		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	RP.	KETERAN GAN													
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		140.735.000	140.735.000	128.579.400		33.680.000	209.404.000											
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD																		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan																		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD																		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD																		
481		Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan/org	90.845.000	90.845.000	82.020.900		18.471.000	124.389.000											
473		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	12 bulan	29.890.000	29.890.000	29.458.500		3.658.500	68.664.500											
478		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	12 bulan	10.000.000	10.000.000	9.029.500		3.480.000	8.280.000											
477		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	10.000.000	10.000.000	8.070.500		8.070.500	8.070.500											
5	Pembangunan Materi Hukum			Produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		1.155.952.000	1.155.952.000	944.380.450		637.347.000	739.321.000											
				Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat																		
3323		Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah	Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya proses evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah	15 Perda, dan 85 Pergub	100.000.000	100.000.000	70.903.650		54.290.000	80.288.000											
563		Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	15 Perda, 85 Pergub, dan 750 Kepgub	738.307.000	738.307.000	603.791.800		417.736.000	468.308.000											
620		Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur, dan 50 MOU	180.935.000	180.935.000	161.149.000		85.741.000	103.963.000											
628		Penyusunan Propem Perda Provinsi	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	15 Ranperda dalam daftar propem Perda	136.710.000	136.710.000	108.536.000		79.580.000	86.762.000											
6	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum			Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani		461.000.000	461.000.000	321.493.000		231.797.000	279.807.000											
		955	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Fasilitasi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan									6 perkara	126.000.000	126.000.000	85.486.000		53.231.000	60.970.000		
		954	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Penanganan kasus di Pengadilan									4 perkara	175.000.000	175.000.000	122.814.000		83.888.000	104.477.000		
		957	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum Di Lingkup Prov Dan Kab/Kota	Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota	1. Pemasalahan Hukum yang ditangani; 2. Rakor Permasalahan hukum Prov dan Kab/Kota									5 kasus	80.000.000	80.000.000	58.946.000	acara rakor ditiadakan	40.243.000	47.360.000		
		2969	Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Laporan RANHAM dan Daftar Produk Hukum Perspektif HAM									1 Laporan	80.000.000	80.000.000	54.247.000		54.435.000	67.000.000		

No	Program	Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)		PEMBAHASAN TIM		Rancangan ke-2	Rancangan ke-3	KETERA NGAN OPD	KEPUTU SAN TAPD
		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	RP.	KETERAN GAN				
7	Sarana Dan Informasi Hukum			Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIIH		220.000.000	220.000.000	154.898.000		112.580.000	133.294.000		
2974		Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	1. Pengembangan Perpustakaan Hukum Provinsi ; 2. Pembinaan Perpustakaan Hukum Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	45.373.000		44.204.000	44.204.000		
958		Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Terkelolanya pendokumentasian produk hukum daerah	300 buku	160.000.000	160.000.000	109.525.000		68.376.000	89.090.000		
8	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan			Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota		1.090.000.000	1.090.000.000	650.454.300		465.227.000	527.895.000		
3113		Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Perda Kab/Kota yang diklarifikasi	30 Perda	300.000.000	300.000.000	181.794.000		116.447.000	135.000.000		
3119		Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota yang diklarifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	240.000.000	240.000.000	149.126.000		78.182.000	161.895.000		
3036		Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	20 Ranperda Kab./Kota	250.000.000	250.000.000	127.922.300		126.762.000	127.000.000		
3128		Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	300.000.000	300.000.000	191.612.000		143.836.000	104.000.000		

Padang, Agustus 2018

si KEPALA BIRO HUKUM.



ENIFITA DJINIS, SH

Pembina Utama Muda,

Nip. 19620330 198903 2 004